



**RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH**  
*ꦫꦺꦤꦕꦏꦿꦗꦏꦺꦫꦶꦠꦢꦫꦺꦫꦲ*  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2022**



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

ky

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.



5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2023, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan renja perangkat daerah Provinsi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

#### BAB II

#### SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal, 8 JULI 2022

SI BUPATI GUNUNGKIDUL, R



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal 8 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SEKRETARIAT  
DAERAH

DRAJAD RUSWANDONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 44.

m

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Pertimbangan .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	5
2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	5
BAB III	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA .....	14
BAB IV	
PENUTUP .....	25

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	7
Tabel 3.1 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah .....	16
Tabel 3.2 Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung Inspektorat Daerah .....	18
Tabel 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022 .....	20



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
GUNUNGKIDUL NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja serta target (*quantitative objectives*) yang diinginkan, apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Pelaksanaan rencana pembangunan yang telah disusun sering terjadi ketidaksesuaian dengan yang direncanakan. Hal ini seiring dengan perkembangan kondisi yang terjadi pada tahun rencana baik yang terjadi dalam lingkup internal Inspektorat dan Kabupaten Gunungkidul maupun dari luar, diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Adanya wabah pandemi *Covid-19* yang dimulai akhir bulan Maret sampai dengan saat ini, juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Perubahan kondisi yang terjadi tentunya harus direspon oleh pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat secara lebih efektif memberikan manfaat kepada masyarakat.

Perbaikan dan penyesuaian anggaran tahun 2022 pada Inspektorat Daerah untuk penanganan Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adanya perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Menyesuaikan perencanaan program kegiatan secara komprehensif, responsif, dan bersifat lebih operasional;
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
3. Adanya pergeseran anggaran dan atau penyesuaian rekening pada beberapa kegiatan serta belanja daerah yang diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak.

## 1.3. Dasar Pertimbangan

Sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan serta memperhatikan rencana dan pelaksanaan anggaran, maka diperlukan penyesuaian untuk dapat mengakomodasikan perubahan yang terjadi baik berupa perubahan kebijakan, perubahan perencanaan maupun dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pendanaan. Berkaitan dengan perubahan RKPD Tahun 2022, secara umum terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi Pemerintah Daerah yang menjadi dasar perlunya perubahan ini.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pembinaan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/3300 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Pertimbangan

1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2012

2.1. Pelaksanaan Renja Tahun 2012

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 sampai dengan Triwulan II

#### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah

3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2012

#### BAB IV PENUTUP

BAB II  
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp10.103.479.936,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah program = 3 program
- Jumlah kegiatan = 33 kegiatan
- Jumlah Anggaran =  
Rp10.103.479.636,00 dengan rincian berikut :
  - Belanja Operasi = Rp9.906.229.936,00
  - Belanja Modal = Rp 197.250.000,00

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja pada kesempatan ini akan menganalisa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Tingkat penyerapan keuangan pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan II mencapai 40,93%, sedangkan capaian kinerjanya mencapai 42,04%.

Masih rendahnya tingkat penyerapan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya ketugasan mendesak yang terkait dengan kebijakan pimpinan;
2. Adanya kegiatan yang harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Pusat Pembinaan JFA selaku pihak penyelenggara diklat;



Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja di tahun 2022 yaitu :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *Quality Assurance, Consulting and Early Warning*;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat terlihat dari realisasi capaian kegiatan seperti pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI HASIL RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KODE	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan orogram/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun lalu 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu								
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021	2	2	2	2	100	2	2	100
		Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2026	1	1	1	1	100	0	0	0
		Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	1	1	100	1	1	100
		Pelaksanaan Forum PD	1	1	1	1	100	1	1	100
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	100	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	1	1	1	100	1	0	0
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen ROPK	1	1	1	1	100	1	1	100
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	1	1	100
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	1	1	1	1	100	1	1	20
		Jumlah Laporan e-Monev	4	4	4	4	100	4	2	50
		Jumlah Laporan TEPRA	12	12	12	12	100	12	6	50
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu								
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	26	14	14	14	100	26	7	26
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	1	1	100	1	1	20
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	2	2	2	100	1	1	100
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi								
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian ASN	49	49	49	48	98	49	49	100
		Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	30	30	30	30	100	30	30	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	27	21	21	21	100	27	21	77
		Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS	160	4	4	4	100	160	7	4
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum terlayani								
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3	3	3	3	100	3	3	100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	10	10	5	5	100	10	3	30
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10	10	5	5	100	10	3	30
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	5	20	5	5	100	5	3	60
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12	48	12	12	100	12	6	50
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	150	600	150	125	83	150	50	30
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	60	240	60	60	100	60	10	16

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	25	100	25		0	25	5	20
		Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	150	600	150	130	87	150	120	80
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik								
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1	-	-	-	-	1	0	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana								
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	600	30	30	30	100	600	15	2,5
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	12	12	12	12	100	12	6	10
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 2 terpelihara	8	7	8	8	100	8	6	75



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 4 terpelihara	7	7	6	6	100	7	4	57
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	8	7	8	8	100	8	4	50
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	7	7	7	6	86	7	3	42
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	45	120	10	9	90	45	30	66
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	40	2	2	100	2	1	50
		Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	1	16	1	1	100	2	1	5
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	0	1	1	1	100	450 meter	1	0
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	60	5	5	100	15	5	100
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai IKM PD	79,16	79	79,16	79	100	79,32	-	
6.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	2	2	2	2	100	2	1	50
		Jumlah dokumen SOP	1	1	1	1	100	1	0	0
		Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	2	2	2	2	100	2	1	50
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	84	84	84	84	100	84	42	50
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan; RKA murni dan perubahan; dan Review BTT)	96	96	96	96	100	96	48	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Belanja Pengadaan Laptop core i5	10	10	10	10	100	-	-	
		Jumlah Belanja Pengadaan OLED TV 75"	1	1	1	1	100	-	-	
		Jumlah Belanja PC All in One	1	1	1	1	100	-	-	
		Jumlah Belanja Pengadaan penghancur kertas	2	2	2	2	100	-	-	
		Jumlah Belanja Pengadaan Scanner ADF	8	8	8	8	100	-	-	
		Jumlah Belanja Pengadaan Speaker aktif	2	2	2	2	100	-	-	
		Jumlah Belanja Pengadaan Vacum cleaner	2	2	2	2	100	-	-	
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10	10	10	10	100			0
		Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	420	84	84	84	100	84	42	10
		Jumlah laporan Evaluasi tindak lanjut	240	2	48	48	100	48	20	8
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil review Renstra 2021-2024	1	1	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	4	4	4	4	100	4	2	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	30	30	30	30	100	30	35	116
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	55	50	50	50	100	50	18	32
		Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen tindaklanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	2	1	1	1	100	1	1	50
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen PKPT, Peta Pengawasan, KMA	3	3	3	3	100	3	2	66

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2	2	2	2	100	2	1	50
		Jumlah Dokumen telaahan staf	4	4	4	4	100	4	0	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi									
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	490	98	98	98	100	96	48	10
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	2	1	1	1	100	2	1	50
		Jumlah laporan evaluasi benturan kepentingan	1	1	1	1	100	1	0	0
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM	1	1	1	1	100	1	0	0
		Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	4	2	2	2	100	4	1	50
		Jumlah Dokumen monev gratifikasi	1	4	4	4	100	1	0	0
		Jumlah Dokumen monev PMPRB	1	1	1	1	100	1	0	0
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	7	7	7	7	100	7	0	0

BAB III  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Rencana kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*output, outcome*). Rencana kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Dalam perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini hanya terdapat pergeseran antar rekening pada kegiatan pengawasan.



Tabel 3.1  
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan  
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	PAGU (RP)		Selisih Anggaran	PD
			Indikator Sasaran	Target			Anggaran Awal	Setelah Perubahan		
Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemeintahan Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Maturitas SPIP	3,86	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.650.489.000,00	1.650.489.000,00	-	IRDA
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	816.599.000,00	816.599.000,00	-	IRDA
						<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	169.290.000,00	169.290.000,00	-	IRDA
						<i>Pengawasan Keuangan Pem. Daerah</i>	132.784.000,00	132.784.000,00	-	IRDA
						<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	133.825.000,00	133.825.000,00	-	IRDA
						<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	380.700.000,00	380.700.000,00	-	IRDA
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	833.890.000,00	833.890.000,00	-	IRDA
						<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	833.890.000,00	833.890.000,00	-	IRDA
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		588.725.000,00	588.725.000,00	-	IRDA
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	IRDA
						<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	-	IRDA
						<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	-	IRDA
						Pendampingan dan Asistensi	583.725.000,00	583.725.000,00	-	IRDA
						<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	576.000.000,00	576.000.000,00	-	IRDA
						<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	7.725.000,00	7.725.000,00	-	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	PAGU (RP)		Selisih Anggaran	PD
			Indikator Sasaran	Target			Anggaran Awal	Setelah Perubahan		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.864.265.936,00	7.871.778.163,00	7.512.227	IRDA
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		54.844.500,00	54.844.500,00	-	IRDA
					<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		50.045.500,00	50.045.500,00	-	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		464.000,00	464.000,00	-	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		464.000,00	464.000,00	-	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		1.407.000,00	1.407.000,00	-	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>		865.000,00	865.000,00	-	IRDA
					<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		1.599.000,00	1.599.000,00	-	IRDA
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.633.628.136,00	6.641.140.363,00	7.512.227	IRDA
					<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		6.626.940.136,00	6.634.452.363,00	7.512.227	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		648.000,00	648.000,00	-	IRDA
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		6.040.000,00	6.040.000,00	-	IRDA
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		142.613.300,00	165.113.300,00	22.500.000	IRDA
					<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		5.333.300,00	5.333.300,00	-	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	PAGU (RP)		Selisih Anggaran	PD
			Indikator Sasaran	Target			Anggaran Awal	Setelah Perubahan		
						<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	137.280.000,00	159.780.000,00	22.500.000	IRDA
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.126.000,00	508.626.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	269.750.000,00	269.750.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	71.010.000,00	71.010.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	18.650.000,00	18.650.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	-	IRDA
						<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	-	IRDA
						<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150.016.000,00	127.516.000,00	-	IRDA
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.404.000,00	51.404.000,00	-	IRDA
						<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>	51.404.000,00	51.404.000,00	-	IRDA
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.325.000,00	176.325.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	153.000.000,00	153.000.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	22.275.000,00	22.275.000,00	-	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	PAGU (RP)		Selisih Anggaran	PD
			Indikator Sasaran	Target			Anggaran Awal	Setelah Perubahan		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.825.000,00	272.825.000,00	-	IRDA
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	183.200.000,00	183.200.000,00	-	IRDA
						<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.250.000,00	12.250.000,00	-	IRDA
						<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	57.375.000,00	57.375.000,00	-	IRDA
						<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	-	IRDA
						Penataan Organisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	IRDA
						<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	-	IRDA
							10.103.479.936	10.110.992.163	7.512.227	

#### Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Pada bulan April 2022 terdapat penambahan 5 (lima ) orang CPNS yang mempengaruhi penambahan anggarannya terkait tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 7.512.227,00 sehingga jumlah total anggaran menjadi Rp 10.110.992.163,00.



**Tabel 3.2**  
**RENCANA PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.1.	BELANJA OPERASI	0,00		0,00	6.626.940.136,00	0,00		0,00	6.634.452.363,00	7.512.227,00	0,11
5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00		0,00	6.626.940.136,00	0,00		0,00	6.634.452.363,00	7.512.227,00	0,11
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00		0,00	3.866.536.596,00	0,00		0,00	3.866.536.596,00	-	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	0,00		0,00	2.873.190.000,00	0,00		0,00	2.854.624.994,00	(18.565.006,00)	(0,65)
5.1.01.01.01.001.	Belanja Gaji Pokok PNS	0,00		0,00	2.873.190.000,00	0,00		0,00	2.854.624.994,00	(18.565.006,00)	(0,65)
	<i>Belanja Gaji Pokok PNS; Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1,00	Ls	2.873.190.000,00	2.873.190.000,00	1,00	Tahun	2.854.624.994,00	2.854.624.994,00	(18.565.006,00)	(0,65)
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	0,00		0,00	301.650.000,00	0,00		0,00	301.650.000,00	-	-
5.1.01.01.02.001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0,00	Ls	0,00	301.650.000,00	0,00	Ls	0,00	301.650.000,00	-	-
	<i>Belanja Tunjangan Keluarga PNS; Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1,00		301.650.000,00	301.650.000,00	1,00		301.650.000,00	301.650.000,00	-	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	0,00		0,00	146.600.000,00	0,00		0,00	146.600.000,00	-	-
5.1.01.01.03.001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00		0,00	146.600.000,00	0,00		0,00	146.600.000,00	-	-
	<i>Belanja Tunjangan Jabatan PNS; Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1,00	Ls	146.600.000,00	146.600.000,00	1,00	Ls	146.600.000,00	146.600.000,00	-	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00		0,00	321.700.000,00	0,00		0,00	321.700.000,00	-	-
5.1.01.01.04.001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00		0,00	321.700.000,00	0,00		0,00	321.700.000,00	-	-
	<i>Belanja Tunjangan Fungsional PNS; Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1,00	Ls	321.700.000,00	321.700.000,00	1,00	Ls	321.700.000,00	321.700.000,00	-	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00		0,00	46.000.000,00	0,00		0,00	46.000.000,00	-	-
5.1.01.01.05.001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00		0,00	46.000.000,00	0,00		0,00	46.000.000,00	-	-
	<i>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1,00	Ls	46.000.000,00	46.000.000,00	1,00	Ls	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	0,00		0,00	157.000.000,00	0,00		0,00	157.000.000,00	-	-

5.1.01.01.06.001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	0.00		0.00	157.000.000,00	0,00		0,00	157.000.000,00	-	-
	<i>Belanja Tunjangan Beras PNS; Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1.00	Ls	157,000,000.00	157.000.000,00	1,00	Ls	157.000.000,00	157.000.000,00	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	0.00		0.00	20.350.000,00	0,00		0,00	38.915.006,00	18.565.006,00	91,23
5.1.01.01.07.001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0.00		0.00	20.350.000,00	0,00		0,00	38.915.006,00	18.565.006,00	91,23
	<i>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1.00	Ls	20,350,000.00	20.350.000,00	1,00	Tahun	38.915.006,00	38.915.006,00	18.565.006,00	91,23
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	0.00		0.00	46.596,00	0,00		0,00	46.596,00	-	-
5.1.01.01.08.001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.00		0.00	46.596,00	0,00		0,00	46.596,00	-	-
	<i>Belanja Pembulatan Gaji PNS; Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1.00	Ls	46,596.00	46.596,00	1,00	Ls	46.596,00	46.596,00	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0.00		0.00	2.760.403.540,00	0,00		0,00	2.767.915.767,00	7.512.227,00	0,27
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0.00		0.00	2.760.403.540,00	0,00		0,00	2.767.915.767,00	7.512.227,00	0,27
5.1.01.02.05.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0.00		0.00	2.760.403.540,00	0,00		0,00	2.767.915.767,00	7.512.227,00	0,27
	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan];</i>	1.00	Ls	2,760,403,540.00	2.760.403.540,00	1,00	Ls	2.767.915.767,00	2.767.915.767,00	7.512.227,00	0,27
Jumlah					6.626.940.136,00				6.634.452.363,00	7.512.227,00	0,11

**Tabel 3.3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2022**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

Kode	Urusan/Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2022						Perkiraan Maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung jawab	Keterangan				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target capaian kinerja				Pagu indikatif			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan( Rp)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6	01							10.103.479.936	10.110.992.163	7.512.227				10.527.826.093						
6	01	01				Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	7.864.265.936	7.871.778.163	7.512.227			8.622.316.093					
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	54.844.500	54.844.500	0			59.530.750					
6	01	01	2.01	01	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Profil PD Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Pelaksanaan Forum PD	Jumlah Dokumen Profil PD Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Pelaksanaan Forum PD	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	50.045.500	50.045.500	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	54.382.750	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.01	02	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	464.000	464.000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	495.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.01	03	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	464.000	464.000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	498.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.407.000	1.407.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.510.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen DPPA Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen DPPA Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	865.000	865.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 1 dokumen	925.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen LKJP Jumlah Laporan e-Monev Jumlah Laporan TEPR	Jumlah Dokumen LKJP Jumlah Laporan e-Monev Jumlah Laporan TEPR	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.599.000	1.599.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.720.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	<b>6.633.628.136</b>	<b>6.641.140.363</b>	<b>7.512.227</b>				<b>7.097.983.676</b>			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	26 bulan	26 bulan	6.626.940.136	6.634.452.363	<b>7.512.227</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 bulan	7.090.825.876	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	648.000	648.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	695.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen 1 dokumen	12 dokumen 1 dokumen	6.040.000	6.040.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dokumen 1 dokumen	6.462.800	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	<b>142.613.300</b>	<b>165.113.300</b>	<b>22.500.000</b>				<b>112.224.500</b>			
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	49 ASN 30 Orang	49 ASN 30 Orang	5.333.300	5.333.300	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 ASN 30 Orang	5.724.500	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40	Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40	18 orang 27 orang	18 orang 27 orang	137.280.000	159.780.000	<b>22.500.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana	Dana Transfer Umum-Dana	18 orang 27 orang	106.500.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							orang x 4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	orang x 4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan							Alokasi Umum	Alokasi Umum					
6	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase layanan administrasi umum terlayani	Persentase layanan administrasi umum terlayani	100 Persen	100 Persen	531.126.000	508.626.000	-22.500.000				569.467.417				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3 jenis	3 jenis	10.000.000	10.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 jenis	11.449.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat Jumlah belanja modal Camera Jumlah belanja modal Handycam Jumlah belanja modal Hardis External Jumlah belanja modal Komputer PC All in One Jumlah belanja modal laptop Core 15 Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter Jumlah belanja modal Penghancur Kertas Jumlah belanja modal Scanner ADF Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat Jumlah belanja modal Camera Jumlah belanja modal Handycam Jumlah belanja modal Hardis External Jumlah belanja modal Komputer PC All in One Jumlah belanja modal laptop Core 15 Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter Jumlah belanja modal Penghancur Kertas Jumlah belanja modal Scanner ADF Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	10 jenis 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 15 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	10 jenis 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 15 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	269.750.000	269.750.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 jenis 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 15 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit	374.966.260	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10 jenis	10 jenis	71.010.000	71.010.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 jenis	71.010.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	5 jenis 6000 lembar	5 jenis 6000 lembar	18.650.000	18.650.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 jenis 6000 lembar	18.650.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12 bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	1.370.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah minuman dan snack tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	150 orang	150 orang	10.500.000	10.500.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150 orang	5.250.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	60 orang 25 orang 150 orang	60 orang 25 orang 150 orang	150.016.000	127.516.000	-22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 orang 25 orang 150 orang	133.587.157	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen	100 Persen	51.404.000	51.404.000	0				100.000.000			
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	0 unit	0 unit	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 unit	50.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah pengadaan SIM HP	Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	1 unit	51.404.000	51.404.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	0	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah pengadaan korden Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	Jumlah pengadaan korden Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	0 meter 0 unit	0 meter 0 unit	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 meter 0 unit	50.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	176.325.000	176.325.000	0				269.325.000			
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah jasa surat menyurat tersedia Jumlah surat yang dikirim	Jumlah jasa surat menyurat tersedia Jumlah surat yang dikirim	12 bulan 600 surat	12 bulan 600 surat	1.050.000	1.050.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 600 surat	50.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	

1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)		12 rekening 12 rekening 12 rekening	12 rekening 12 rekening 12 rekening	153.000.000	153.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 rekening 12 rekening 12 rekening	160.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	jumlah jasa kebersihan kantor dibayar		12 bulan	12 bulan	22.275.000	22.275.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	59.325.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	<b>272.825.000</b>	<b>272.825.000</b>	<b>0</b>				<b>411.484.750</b>			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya		8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	183.200.000	183.200.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	250.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya		2 unit 45 unit 2 unit	2 unit 45 unit 2 unit	12.250.000	12.250.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 unit 45 unit 2 unit	14.311.250	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah rehab pagar dan taman kantor	Jumlah rehab pagar dan taman kantor		450 meter	450 meter	57.375.000	57.375.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450 meter	130.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya		15 unit	15 unit	20.000.000	20.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 unit	17.173.500	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.13		<b>Penataan Organisasi</b>			IKM PD	IKM PD		79.32 indeks	79.32 indeks	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		<b>2.300.000</b>		Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen RTP SPIP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen RTP SPIP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)		2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	1.500.000	1.500.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.300.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	1.650.489.000	1.650.489.000	0				1.491.500.000			
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	816.599.000	816.599.000	0				625.500.000			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	96 dokumen	96 dokumen	169.290.000	169.290.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 dokumen	150.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	84 auditan 4 dokumen	84 auditan 4 dokumen	132.784.000	132.784.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	84 auditan 4 dokumen	150.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	1 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 4 dokumen	133.825.000	133.825.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen 4 dokumen	140.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	30 dokumen 48 dokumen	30 dokumen 48 dokumen	380.700.000	380.700.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 dokumen 48 dokumen	185.500.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	833.890.000	833.890.000	0				866.000.000			
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	833.890.000	833.890.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	866.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
6	01	03		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100 Persen	100 Persen	588.725.000	588.725.000	0				414.010.000			



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	0				5.710.000			
6	01	03	2.01	01	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	3 dokumen	3 dokumen	2.500.000	2.500.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	2.850.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.01	02	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	2 dokumen 4 dokumen	2 dokumen 4 dokumen	2.500.000	2.500.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	2.860.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi			Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana	Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana	100 Persen	100 Persen	583.725.000	583.725.000	0				408.300.000			
6	01	03	2.02	01	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	96 dokumen	96 dokumen	576.000.000	576.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	400.000.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.02	02	Kab. Gunungkidul	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan movev Koruspgah KPK Jumlah Dokumen movev gratifikasi Jumlah Dokumen movev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan movev Koruspgah KPK Jumlah Dokumen movev gratifikasi Jumlah Dokumen movev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	7.725.000	7.725.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan movev Koruspgah KPK Jumlah Dokumen movev gratifikasi Jumlah Dokumen movev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	8.300.000	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah	
											10.103.479.936	10.110.992.163	7.512.227				10,527,826,093			

BAB V  
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko PD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen risiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran daerah maupun sasaran PD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Membuka layanan klinik konsultasi.
5. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
6. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023.

  
BUPATI GUNUNGKIDUL,  
*[Signature]*  
SUNARYANTA